

Bentuk dan Konstruksi Pendidikan Politik pada Organisasi Mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Kota Pangkalpinang

Imam Alfikri Pratama

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

imam.alfikri@iainsasbabel.ac.id

Submission: 23th,
February, 2022

Revised: 20th, June,
2022

Published: 05th, July,
2022

Abstract

This study aimed to find out how, what kind of ways, methods and the political education basic conducted and how the role of political education conducted KAMMI and IMM student organizations in Pangkalpinang. This study used a qualitative approach with descriptive study method. Data collection techniques used were interviews, observation, documentation studies and literature studies. The results revealed that student KAMMI and IMM in Pangkalpinang looked at education as an effort to build political understanding in the context of civilization politics. Besides, the political education could establishing student leadership in managing student organizations. The ways for creating political education are through political education cadre, and training organization; The methods used are training, self-learning, study material, internal discussions and public discussion on the organization.

Keywords: Political Education, Student Organization

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana bentuk dan metode serta konstruksi pendidikan politik yang dilakukan serta organisasi mahasiswa KAMMI dan IMM di kota Pangkalpinang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa KAMMI dan IMM di kota Pangkalpinang memandang pendidikan politik sebagai upaya membangun pemahaman politik dalam konteks politik kenegaraan. Selain itu pendidikan politik juga bisa menjadi sarana membentuk jiwa kepemimpinan mahasiswa dalam mengelola organisasi mahasiswa. Bentuk, metode dan konstruksi pendidikan politik yang dilakukan adalah bentuk pendidikan politik kaderisasi, penugasan serta latihan organisasi, Metode yang digunakan adalah pelatihan, belajar mandiri, kajian materi, serta diskusi internal maupun diskusi publik pada organisasi

•
Kata Kunci: Pendidikan Politik, Organisasi Mahasiswa

Pendahuluan

Cara terbaik dalam membangun demokrasi suatu bangsa adalah dengan membangun keterdidikan dan pemahaman politik warga negara. Proses demokratisasi akan senantiasa menuntut peran serta warga negara dalam proses politik. Bila keterdidikan politik merupakan syarat mutlak pembangunan kualitas demokrasi, maka pendidikan politik adalah cara terbaik membangun keterdidikan dan pemahaman politik. Dengan pendidikan politik akan tercipta proses menanamkan dan mentransfer nilai-nilai dan pengetahuan politik. Lebih dari itu dengan pendidikan politik akan terbangun wawasan-pengetahuan, sikap-kesadaran, serta perilaku politik yang mendukung terbentuknya budaya politik sebagai penopang proses demokratisasi.

Pendidikan politik sebagai upaya membangun pemahaman dan keterdidikan politik yang salah satu instrumennya adalah kognisi dan kecerdasan moral akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan pola perilaku politik ini. Melalui apa yang diterima dari pendidikan politik sebagai sarana internalisasi nilai politik maka akan menentukan bagaimana aktualisasi sikap dan perilaku terhadap sebuah sistem politik. Perilaku politik yang baik disertai dengan pendidikan politik pada akhirnya akan menunjang terbangunnya budaya politik ideal. Alfian (1992, hlm. 235) mengemukakan bahwa :

Pendidikan politik (dalam arti kata yang lebih sempit) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru.

Demokratisasi mutlak memerlukan dukungan terciptanya budaya politik ideal, yang dalam konteks politik kenegaraan Indonesia adalah budaya politik Pancasila. Melihat realita yang terjadi demokratisasi kita malah berhadapan dengan masalah-masalah politik yang seakan tak kunjung selesai. Hal ini menyebabkan politik oleh sebagian masyarakat dipersepsikan hanya tentang kekuasaan jauh dari nilai politik itu sendiri yakni sebagai usaha bersama warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Hal ini berlaku juga pada penerimaan generasi muda Indonesia dalam melihat politik. Generasi muda kini melihat politik sebagai suatu hal yang harus di jauhi. Padahal kelak Indonesia akan mengalami apa yang disebut dengan bonus demografi, dimana generasi muda merupakan segmentasi terbesar dari jumlah penduduk. Ini adalah anugrah yang harus disikapi secara arif, bagaimana akan memperbaiki kualitas demokrasi bila penerus masa depan bangsa apatis terhadap politik. Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam pembangunan kualitas demokrasi melalui penyadaran tentang pemahaman dan keterdidikan politik. Pendidikan politik generasi muda harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan kualitas demokrasi dengan melihat bonus demografi sebagai sebuah tantangan ke depan. Generasi muda akan bisa menjadi *trigger* pembanguan kualitas demokrasi. Melihat ke belakang dalam sejarah panjang bangsa ini

generasi muda memiliki peran penting dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa dibuktikan dengan setiap peristiwa sejarah bangsa, generasi muda selalu muncul sebagai motor penggerak. Generasi muda adalah penerus estafet kepemimpinan politik masa depan bangsa ini.

Mahasiswa yang menjadi bagian generasi muda dalam struktur warga negara memang memiliki jumlah yang kurang signifikan tetapi mahasiswa bisa dikatakan sebagai tulang punggung utama generasi muda. Sebagai warga negara yang dianggap terdidik dengan cap pendidikan tinggi yang melekat Mahasiswa merupakan kekuatan moral dan agen perubahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda yang lekat dengan cap akademis dan intelektualitas harusnya memiliki wawasan akademik serta tertarik pada pemikiran masalah sosial politik kenegaraan bangsa. Dalam tiap laju demokratisasi mahasiswa merupakan salah satu pilar utama yang perlu diperhatikan.

Realitas yang terjadi sekarang ini adalah sebagian mahasiswa melihat politik sebagai hal buruk yang harus di jauhi. Ini merupakan akibat dari tidak berhasilnya pendidikan politik memainkan peran pentingnya. Padahal dulu laju perjalanan panjang bangsa ini ditentukan oleh bagaimana peran politik mahasiswa dalam memainkan peranannya sebagai agen perubahan dan kontrol sosial. Sejatinya pendidikan politik mahasiswa tak kurang, banyak bentuk pendidikan politik yang menyentuh langsung mahasiswa. Mulai dari pendidikan kewarganegaraan yang menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi, pendidikan politik yang diterima melalui media massa dan media sosial, serta pendidikan politik dalam bentuk kaderisasi yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa.

Pendidikan politik dalam bentuk terakhir ini yang menjadi hal vital, karena melalui proses pendidikan politik pada organisasi mahasiswa ini mahasiswa akan di tempa dengan berbagai hal yang menuntut mereka untuk berpikir secara kritis. Melalui organisasi mahasiswa, mahasiswa akan berdialog dengan berbagai masalah sosial politik yang akan membangun pemahaman politik mereka secara luas. Hermawan (2006, hlm 499) menjelaskan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik, maka perlu dilaksanakan dengan mengintensifkan pendidikan politik terhadap mahasiswa. Pendidikan politik terhadap mahasiswa salah satunya adalah melalui organisasi mahasiswa, sebagai salah satu wadah untuk mahasiswa berdialog organisasi mahasiswa merupakan tempat mahasiswa belajar tentang kehidupan sosial politik yang dihadapinya.

Pendidikan politik pada organisasi mahasiswa akan memberi bekal pengetahuan yang memperluas cakrawala pengetahuan politik sehingga akan membentuk pola perilaku dan sikap politik mahasiswa yang pada akhirnya mahasiswa akan bisa memainkan perannya dalam membangun sebuah budaya politik ideal yaitu budaya politik pancasila. Affandi (2011, hlm. 9) mengungkapkan bahwa pendidikan politik kader bangsa secara umum bertujuan memberi bekal pengetahuan dalam rangka memperluas cakrawala politik peserta, sebagai sumbangsih nyata dalam upaya penanaman nilai peradaban politik bagi rakyat dan pemuda pada umumnya

Pendidikan politik kaderisasi pada organisasi mahasiswa harusnya adalah pendidikan politik yang menanamkan nilai-nilai politik yang terkandung dalam sistem politik Pancasila. Lebih lanjut Affandi (2011, hlm 10) mengemukakan bahwa

Pada forum pendidikan politik kader bangsa, peserta dibekali pengetahuan serta mampu ditempa mentalnya agar siap menjadi kader bangsa. Pengetahuan politik yang diberikan sebagai salah satu materi pendidikan merupakan faktor penting, karena didalamnya terdapat butir-butir pemikiran dan pengetahuan yang sangat berharga dalam rangka memahami kehidupan politik bangsa.

Dengan menanamkan nilai-nilai politik ini maka akan melahirkan generasi yang bisa membangun budaya politik Pancasila dalam rangka mewujudkan cita-cita kebangsaan Tetapi yang kebanyakan muncul adalah organisasi mahasiswa yang dekat dengan ideologi politik tertentu. Pendidikan politik kaderisasi lebih menjadi semacam indoktrinasi politik demi kepentingan politik tertentu. Hal ini tentu saja tidak akan bisa membangun budaya politik Pancasila, yang muncul kemudian perilaku politik yang dekat dengan kelompok politik tertentu, dengan pola perilaku politik yang sempit, puritan, dan partisan

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) merupakan dua dari organisasi mahasiswa yang muncul, tumbuh, dan berkembang di Kota Pangkalpinang dua tahun ke belakang, keduanya merupakan organisasi mahasiswa ekstra kampus yang dekat dengan orientasi keagamaan dan ideologi politik tertentu. KAMMI di dirikan pada menjelang reformasi dengan latar belakang lembaga aktivis dakwah kampus, sedangkan IMM adalah organisasi mahasiswa di bawah payung muhamadiyah yang lahir pada tahun 1964. KAMMI dan IMM adalah organisasi mahasiswa yang telah cukup mapan secara nasional. Di kota Pangkalpinang kedua organisasi mahasiswa ini merupakan angin segar ditengah minimnya wadah mahasiswa untuk mengaktualisasikan dirinya. Kedua organisasi mahasiswa ini bisa menjadi wadah pendidikan politik kaderisasi dalam rangka mewujudkan pengetahuan politik mahasiswa.

Kedekatan kedua organisasi mahasiswa ini dengan ideologi politik tertentu kemudian muncul menjadi pertanyaan. KAMMI yang dekat dengan ideologi politik Ikhwanul Muslimin yang diwakili oleh Partai Keadilan Sejahtera dan IMM yang dekat ideologi Muhammadiyah dengan diwakili oleh Partai Amanat Nasional, pertanyaan yang muncul adalah bagaimanakan bentuk dan metode pendidikan politik kaderisasi yang dilakukan oleh kedua organisasi mahasiswa ini ditengah euforia berorganisasi mahasiswa di kota Pangkalpinang, dan apakah bentuk dan metode pendidikan politik kaderisasi yang dilakukan membentuk perilaku politik yang sempit, puritan, dan partisan ataukah pendidikan politik kaderisasi yang dilakukan bisa membentuk perilaku politik yang ideal.

Berdasarkan hal dan pertanyaan-pertanyaan diatas maka artikel ini mengkaji bagaimana bentuk dan konstruksi pendidikan politik yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa KAMMI dan IMM di kota Pangkalpinang.

Pendidikan Politik

Menjelaskan pendidikan politik tidak bisa dilepaskan dari dua kata yaitu pendidikan dan politik. pendidikan sebagai sebuah usaha terencana membangun pengetahuan agar

terbentuk karakter manusia yang seutuhnya. Pendidikan merupakan proses yang selalu terikat nilai dalam pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan politik yang sejatinya adalah bagaimana mewujudkan nilai-nilai kebaikan dalam mencapai kebaikan bersama. Pendidikan politik adalah upaya membangun keterampilan politik warga negara dalam rangka partisipasi positif pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang tentang Partai Politik No. 2 tahun 2008 pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa “pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”

Pendidikan politik mempunyai makna sebagai upaya pengajaran warga negara tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Dalam negara demokrasi pendidikan politik adalah sarana memperkuat proses demokratisasi. Pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara sebagai salah satu penyokong utama sistem politik. Selain itu pendidikan politik juga dapat mencegah apatisme dan sinisme masyarakat terhadap politik. Kartono (2009, hlm. 64) menyebutkan bahwa :

Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja, dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam memncapai tujuan-tujuan politik.

Pendidikan politik dari sudut pandang ini adalah sebagai upaya pendidikan yang memberikan pengetahuan politik sebagai bagian dari pembentukan individu yang sadar politik. Edi Puka (2013, hlm. 230) mendefinisikan pendidikan politik sebagai “*Political education can be defined as the process of critical elaboration of the content of political socialization, which tends to promote an independent ability to develop an own attitude or political choice.*” Dalam pendapat ini pendidikan politik dimaknasi sebagai bagian dari sosialisasi politik yang membangun sikap dan pilihan politik. sebagai sebuah proses pendidikan politik merupakan proses elaborasi kritis terhadap konten dari sosialisasi politik.

Sedangkan Rusadi Kantaprawira (dalam Affandi 2011, hlm. 32) memandang pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Dalam perspektif ini pendidikan politik menitikberatkan pada aspek partisipasi warga negara. Perspektif ini mengenyampingkan aspek keterlibatan warga negara dalam mengkritisi proses atau sistem politik.

Pendidikan politik merupakan proses pemahaman nilai-nilai politik yang menjadi landasan dalam sistem politik. Pemahaman akan nilai-nilai politik ini kemudian menjadi landasan bagi warga negara dalam menjalankan kehidupan politiknya. Lebih lanjut Affandi (2011, hlm 10) mengemukakan bahwa pengetahuan politik yang diberikan sebagai salah satu materi pendidikan merupakan faktor penting, karena didalamnya terdapat butir-butir pemikiran dan pengetahuan yang sangat berharga dalam rangka memahami kehidupan politik bangsa.

Pengetahuan akan sistem politik yang terbangun dari nilai-nilai politik akan membentuk sebuah budaya politik yang merupakan penopang ideal sistem politik suatu bangsa. Banyak ahli yang menyamakan pendidikan politik dengan sosialisasi politik. Secara garis besar pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. Alfian (1981, hlm. 235) mengemukakan pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Mengaitkan pendidikan politik dengan proses sosialisasi politik harus terlebih dahulu dijelaskan mengenai apa itu sosialisasi politik. Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah istilah *political education*, *socialization* dan *citizenship training*, yang digunakan silih berganti (Affandi, 2011, hlm 31). Sosialisasi politik merupakan sebuah upaya belajar yang memiliki konsepsi sangat luas, sebagai sebuah upaya pembudayaan sosialisasi politik salah satunya mencakup pendidikan politik. Surbakti (2010, hlm. 150) berpendapat bahwa :

Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses internalisasi nilai-nilai politik yang terdapat dalam sistem politik. nilai-nilai ini akan menjadi landasan dalam pelaksanaannya.

Bentuk Pendidikan Politik

Bentuk pendidikan politik secara umum dibagi menjadi dua bentuk yaitu bentuk formal dan non formal. Pada bentuk formal pendidikan politik erat kaitannya dengan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu bentuk program pendidikan politik dalam doamin kurikuler persekolahan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan politik dalam arti makro yang memiliki muatan nilai dan moral dalam tujuannya me bentuk warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan sejatinya adalah usaha membina peserta didik menjadi warga negara yang melek politik.

Dalam pendidikan kewarganegaraan merupakan jalur pendidikan politik dalam bentuk formal. Bentuk pendidikan yang dilaksanakan dalam jalur dan jenjang pendidikan formal di bangku sekolah. Dalam muatannya pendidikan politik pada pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang membangun pengetahuan melalui materi-materi yang berhubungan dengan politik. Hal ini lebih menitikberatkan pada pemahaman warga negara akan hak dan kewajibannya dalam bernegara. Salah satunya adalah hak dan kewajiban politik dalam bidang politik. Kerangka pendidikan politik dalam pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk membentuk warga negara yang baik atau yang dikenal dengan istilah *good citizenship*.

Pendidikan politik juga bisa dilakukan dalam bentuk lain, yaitu bentuk non formal melalui bentuk ini pendidikan politik mempunyai banyak model. Model formal dan non formal ini harus berjalan beriringan dalam upaya sistematis pendidikan politik yang

dilakukan. Kartaprawira (2004, hlm. 56) mengemukakan bahwa pendidikan politik dapat dilaksanakan antara lain melalui :

- a. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
- b. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media)
- c. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal atau informal.

Pendapat di atas menekankan bentuk pendidikan politik sebagai suatu yang lebih umum. Pendidikan politik bisa dilakukan melalui media massa dan lembaga informal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Media massa dan organisasi informal dalam masyarakat merupakan hal terpenting dalam membangun kualitas demokrasi suatu bangsa. Hal ini lah yang mendasari pendapat bahwa keduanya merupakan pelaksana dari pendidikan politik. Media massa bahkan disebut sebagai pilar ke 4 dalam demokrasi, sedangkan lembaga informal dalam perspektif negara bangsa yang baru merupakan penyokong pemerintahan.

Dalam perspektif pendidikan politik sebagai sebuah usaha sistematis maka diperlukan sebuah acuan dalam pelaksanaannya. Acuan ini kemudian di sebut kurikulum dalam pendidikan politik. Brownhill dan Smart (1989, hlm. 104) berpendapat :

We shall use stradling's proposals for such a curriculum as a checklist for deciding on priorities. He examines the contents of the political curriculum by dividing into three section: knowledge, skills, and attitudes and procedural values. He further divides knowledge into propositional knowledge, and practical knowledge and understanding: skill into intellectual skills, action skills, and communication skills.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum pendidikan politik harus memuat hal-hal yang mendukung terbangunnya pengetahuan politik, keterampilan politik, dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai dalam politik. Lebih lanjut Brownhill dan Smart (1989, hlm. 110-111) menyebutkan kurikulum pendidikan politik harus memuat hal-hal berikut :

- a. *An ethical based should be developed, which would include respect for other, tolerance, and an understanding of the principle of treating others as one would like to be treated oneself.*
- b. *A consideration of how rules can be changed, and generally of how to get things done.*
- c. *Nature of rules and authority*
- d. *Concepts of obligation to legitimate authority.*
- e. *An understanding of some basic political cocncepts, e.g freedom, equality, justice, the rule of law, and some of the arguments related to these concepts.*
- f. *An understanding off the basic structure of central and local government*
- g. *Some understanding of the working of the national and international economy.*
- h. *Some knowledge of recent British and international history*
- i. *Self-analysis*

Pendidikan politik pada mahasiswa bukan pada tujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi seorang pelaku pada tataran politik praktis, tetapi lebih kepada bagaimana mahasiswa bisa memainkan perannya dalam kehidupan sosial politik kebangsaan. Usman. (1999 hlm, 159) mengemukakan bahwa peran politik mahasiswa berada di luar institusi birokrasi dan diluar institusi politik (partai politik) namun tetap melakukan fungsi kontrol politik. Kaderisasi dalam organisasi mahasiswa yang juga termasuk dalam bentuk pendidikan politik adalah bagian dari menyiapkan mahasiswa menjadi pemimpin dan anggota organisasi.

Di dalamnya terdapat muatan-muatan yang bersinggungan dengan pembangunan wawasan politik anggota organisasi. Affandi (2011, hlm. 9) mengungkapkan bahwa pendidikan politik kader bangsa secara umum bertujuan memberi bekal pengetahuan dalam rangka memperluas cakrawala politik peserta, sebagai sumbangsih nyata dalam upaya penanaman nilai peradaban politik bagi rakyat dan pemuda pada umumnya. Pendidikan politik sebagai bagian dari kaderisasi anggota organisasi mahasiswa merupakan salah satu yang termasuk ke dalam pendidikan politik kader bangsa ini, dalam pelaksanaannya pendidikan politik dalam bentuk ini merupakan salah satu penghasil pemimpin-pemimpin masa depan bangsa.

Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang melakukan penelitian dengan menggunakan prosedur kualitatif yang berupa pengumpulan data dengan melihat realitas yang sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif.

Dengan subjek penelitian pengurus organisasi mahasiswa dan anggota organisasi mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Serta menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data .

Temuan dan Pembahasan

Bentuk , Metode Dan Konstruksi Pendidikan Politik

Kewajiban melaksanakan pendidikan politik tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, partai politik dan lembaga pendidikan. Tapi juga menjadi kewajiban masyarakat secara umum, melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan. Salah satunya adalah melalui organisasi mahasiswa untuk membentuk generasi muda yang melek politik, serta ikut serta dalam kehidupan politik kenegaraan. KAMMI dan IMM sebagai organisasi mahasiswa merupakan wadah bagi generasi muda khususnya mahasiswa dalam mengembangkan wawasan politik dan jiwa kepemimpinan. Pendidikan politik yang dilakukan organisasi mahasiswa KAMMI dan IMM kepada para anggotanya merupakan bentuk dari pendidikan kaderisasi yang memberikan pemahaman tentang kesadaran politik. pada organisasi mahasiswa KAMMI pendidikan politik merupakan landasan membentuk pemahaman politik yang berkaitan dengan kesadaran politik. KAMMI

berpandangan bahwa kesadaran politik anggota KAMMI yang memiliki pemahaman politik bisa dilihat dari bagaimana KAMMI memainkan peran dan fungsi sosial politiknya ditengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen pengkaderan KAMMI, bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh KAMMI. Yang pertama adalah bentuk kaderisasi berjenjang anggota, kaderisasi ini dimulai dari dauroh marhalah I yang merupakan jenjang kaderisasi bagi anggota biasa I atau yang disebut dengan AB I. Kegiatan ini bisa dilakukan dijenjang komsariat KAMMI atau juga bisa dilakukan oleh gabungan komsariat, bentuk kaderisasi tingkat pertama ini dilakukan dengan struktur dan kurikulum baku yang dirumuskan oleh pengurus pusat KAMMI. Selanjutnya adalah dauroh marhalah II yang merupakan jenjang kaderisasi bagi anggota biasa 2, kegiatan ini dilakukan oleh dewan pimpinan daerah KAMMI. Materi dan bentuk kegiatan dalam kegiatan ini juga telah terstruktur dengan baik. Kemudian adalah dauroh marhalah III yang merupakan jenjang kaderisasi bagi anggota biasa 3. Kegiatan ini dilakukan oleh pengurus pusat KAMMI. Jenjang kaderisasi ini merupakan landsan dalam membentuk pemahaman dasar para anggota KAMMI.

Dilihat dari pendidikan politik kaderisasi yang dilakukan KAMMI jelas terlihat bahwa pendidikan politik kaderisasi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang bertujuan membangun wawasan dan pengetahuan politik anggota. Pendidikan politik kaderisasi berjenjang yang dilakukan KAMMI adalah pemebelajaran politik yang dilakukan KAMMI pada jenjang kaderisasi dimulai dari DM I bisa dilihat pada materi-materi syahadatain sebagai titik tolak perubahan, syumuliatul islam, problematika umat kontemporer, pemuda dan perubahan social, serta sejarah dan filosofi gerakan KAMMI. DM I lebih ditekankan kepada pemahaman ideologi. Selain itu ada pula materi lokal yang disesuaikan dengan keadaan daerah. Selanjutnya pada DM II materi-materi yang diberikan seperti tentang konsep masyarakat islami, mengkaji pemikiran tokoh pergerakan islam, mengkaji kepemimpinan dalam islam, serta konsepsi negara dalam perpsektif al-quran dan as-sunnah. Sedangkan pada DM III materi yang disampaikan diantaranya adalah konsepsi kepemimpinan, dan studi tentang sistem ketatanegaraan.

Pendidikan politik yang dilakukan KAMMI juga dilakukan dalam bentuk lain seperti, madrasah KAMMI, dalam bentuk penugasan yang diberi nama manhaj tugas baca (MANTUBA), mabit dan *liqo*, kajian rutin tematik, serta berbagai macam training baik tentang organisasi dan lain-lain. Model bentuk pendidikan politik ini juga diberikan berjenjang sesuai dengan jenjang kaderisasi anggota. proses pendidikan politik yang dilakukan oleh KAMMI merupakan proses pembelajaran politik yang bersifat menyeluruh. Hal ini bisa dilihat pada materi pokok model-model pembelajaran politik KAMMI seperti wawasan keIndonesiaan, kemampuan sosial politik, kepemimpinan, pengembangan diri serta pergerakan dan manhaj perjuangan. Selain pemebelajaran politik KAMMI juga dilaksanakan dalam bentuk kaderisasi dan bentuk lain, KAMMI juga mengadakan pemebelajaran politik dalam bentuk diskusi publik, audiensi dengan lembaga eksekutif dan legislatif serta kunjungan tokoh.

Selanjutnya adalah bentuk, metode dan konstruksi pendidikan politik di organisasi mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. IMM merupakan organisasi mahasiswa yang menjadi wadah bagi anggotanya untuk beraktualisasi dan mengembangkan diri. Belajar mengelola organisasi dan mengembangkan jiwa kepemimpinan adalah satu bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh IMM. Dalam pandangan pengurus IMM DPD Bangka Belitung pengetahuan politik sebagai modal awal tidaknya melulu tentang politik praktis tapi lebih disesuaikan dengan lingkup kehidupan mahasiswa, misalnya tentang kepemimpinan dan mengelola organisasi. Terlebih pada IMM sebagai organisasi mahasiswa sebaiknya lebih ditekankan pada bagaimana IMM memberikan warna dalam dinamika organisasi kemahasiswaan, lebih lekat dengan urusan mahasiswa dan kampus. IMM harus menjauhi politik praktis sehingga tidak dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta kajian terhadap dokumen pengkaderan IMM, bentuk pendidikan politik di IMM terdapat beberapa bentuk. Diantaranya adalah bentuk kaderisasi yang dimulai dari Dimulai Darul Arqam Dasar (DAD), ini merupakan jenjang kaderisasi tingkat dasar darul arqam dasar ini dilaksanakan oleh Pimpinan Komisariat. Darul arqam dasar merupakan syarat utama untuk menjadi anggota IMM. Selanjutnya adalah Darul Arqam Madya (DAM), ini merupakan jenjang kaderisasi tingkat kedua, darul arqam madya diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang. Yang terakhir adalah Darul Arqam Paripurna (DAP), ini adalah jenjang kaderisasi tingkat lanjut yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah. Pada dasarnya pelatihan kaderisasi yang dinamakan darul arqam ini merupakan program berjenjang yang mempunyai peran penting dalam membentuk pemahaman dasar para anggota tantang IMM.

Selain model kaderisasi ada bentuk lain pengembangan kader yang dilakukan oleh IMM diantaranya adalah Jalur perkaderan khusus, jalur perkaderan khusus ini dinamakan latihan instruktur. Latihan instruktur adalah perkaderan khusus yang menjadi fasilitas didik resmi dan disusun secara berjenjang sebagai upaya untuk meningkatkan kualifikasi kader secara bertahap agar memperoleh kompetensi dalam mengelola perkaderan. Latihan instruktur ini terdiri dari beberapa jejang yaitu, Ikatan latihan instruktur dasar (LID) yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang latihan instruktur madya (LIM) yang diselenggarakan oleh oleh dewan pimpinan daerah serta latihan instruktur paripurna (LIP) yang diselenggarakan oleh dewan pimpinan pusat. Latihan instruktur ini diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan tenaga-tenaga instruktur, baik itu pada tingkat komsariat, cabang maupun tingkat daerah. Hoermardhani (1982, hlm 41) mengemukakan bahwa pendidikan kader merupakan usaha sadar untuk membangun sekelompok warga negara agar dapat menjadi kekuatan dan tulang punggung proses sejarah bangsa. Pembinaannya dapat diselenggarakan melalui latihan, kursus-kursus, bimbingan dan atau penyuluhan.

Pada pengkaderan IMM, materi-materi dalam bentuk jenjang kaderisasi dan pelatihan yang berhubungan dengan upaya pendidikan politik IMM bisa dilihat dari materi-materi pokok yang diberikan yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan islam gerakan pembaharuan di indonesia kepribadian muhammadiyah sejarah pendirian IMM,

kepemimpinan IMM, khittah dan identitas IMM, sistem kepemimpinan islam dan teori leadership. Sedangkan dapa darul arqam madya diantaranya bisa dilihat pada materi-materi tentang khittah perjuangan muhammadiyah, IMM dan gerakan mahasiswa nasional, IMM dan transformasi kader dalam muhammadiyah, IMM dan transformasi kader dalam masyarakat, pola kepemimpinan muhammadiyah, pola kepemimpinan mahasiswa aliran-aliran filsafat pancasila serta kebijakan politik nasional. Sedangkan pada darul arqam paripurna materi-materi yang berhubungan dengan model pendidikan politik diberikan secara luas dan mendalam, diantaranya adalah ideologi politik perjuangan muhammadiyah, kebijakan politik kemahasiswaan, akhlaq kepemimpinan, pengembangan manajemen persyarikatan, profil kader imm, pola dan arah transformasi kader imm, kebijakan ekonomi nasional ,rekayasa sosial masyarakat masa depan filsafat kekuasaan dalam islam filsafat gerakan (harakah) islamiah, politik komunikasi dan komunikasi politik dan moral politik.

Simpulan

Bentuk, metode dan konstruksi pendidikan politik yang dilakukan organisasi mahasiswa KAMMI dan IMM di kota Pangkalpinang adalah bentuk pendidikan politik kaderisasi, pada organisasi mahasiswa KAMMI pendidikan kaderisasi terdiri dari DM I sampai DM 3, sedangkan pada organisasi IMM adalah Darul Arqam Dasar (DAD) dan Darul Arqam Madya (DAM). Kemudian pada organisasi mahasiswa KAMMI juga dilaksanakan dalam bentuk lain seperti penugasan yang diberi nama manhaj tugas baca (MANTUBA), mabit dan *liqo*, kajian rutin tematik, serta berbagai macam training baik tentang organisasi dan lain-lain, serta pemebelajaran politik dalam bentuk diskusi publik, audiensi dengan lembaga eksekutif dan legislatif serta kunjungan tokoh. Sedangkan pada organisasi mahasiswa IMM adalah jalur kaderisasi khusus yang disebut dengan latihan instruktur dasar (LID. Selain itu bentuk lainnya adalah kajian dan diskusi internal di organisasi mahasiswa IMM dikota Pangkalpinang.

Metode yang digunakan adalah pelatihan, belajar mandiri, kajian materi, serta diskusi internal maupun diskusi publik pada organisasi mahasiswa KAMMI, sedangkan pada IMM adalah pelatihan, diskusi, praktek, ceramah dan penugasan. Pendidikan politik yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa KAMMI dan IMM dikota Pangkalpinang sama-sama berkorelasi terhadap pengetahuan politik anggotnya. Dimana mereka lebih sadar akan hak dan kewajibannya, serta ikut mengambil peran sosial politik mereka sebagai mahasiswa.

Daftar Pustaka

- Affandi. Idrus (2011). *Pendidikan Politik (Mengefektivkan Organisasi Pemuda, Melaksanakan Politik Pancasila dan UUD 1945)* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Alfian (1992). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT Gramedia.
- Alfian (1981). *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Brownhill, R and Patricia Smart (1989). *Political Education*. London and New York: Routledge
- Hermawan. Iyep (2006). *Peranan Pendidikan Politik Dalam Membina Insan Akademis Berperilaku Demokratis*. Jurnal Civicus. Vol II. Hal 494-501
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung : Mandar Maju
- Kantaprawira, R. (2004). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung ; Sinar Baru Algesindo
- Puka. Edi (2013). *Political Education. The Global Education of Citizen through Active Citizenship. Studi sulla formazione*. Firenze University Press. Hal . 229-236
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sunyoto. Usman. (1999). *Arah Gerakan Mahasiswa: Gerakan Politik Ataupun Gerakan Moral?*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Vol 3 No 2 Hlm 146-163
- Undang-Undang tentang Partai Politik No. 2 tahun 2008